

Judul : Anggota DPR dan Ketua PN Manado Kena OTT
Tanggal : Minggu, 08 Oktober 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1

Anggota DPR dan Ketua PN Manado Kena OTT

● DIAN ERIKA NUGRAHENY

Penyerahan uang suap diindikasikan terjadi di pintu darurat hotel.

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan politik Partai Golkar Aditya Anugrah Moha sebagai tersangka kasus suap terhadap ketua Pengadilan Negeri (PN) Manado, Sulawesi Utara (Sulut). Aditya diketahui merupakan anggota Komisi XI DPR RI.

Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Aditya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di lobi sebuah hotel di Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (6/10). Aditya diketahui memberikan suap kepada Ketua PN Manado, Sudiwardono, di hotel tersebut.

Pemberian suap diduga untuk memengaruhi putusan banding atas kasus korupsi tunjangan pendapatan aparat pemerintah desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow. Adapun terdakwa dalam kasus itu adalah Marlina Moha Siahaan yang merupakan mantan bupati Bolaang Mongondow periode 2006-2011. Marlina adalah ibu dari Aditya.

"PT Manado dalam putusan Nomor 49/pidsus-tpk/2016 menjatuhkan vonis lima tahun kepada Marlina Mo-na Siahaan atas korupsi TPAPD Kabupaten Bolaang Mongondow senilai Rp 1,25 miliar. Aditya sebagai pihak keluarga terdakwa diduga memberikan suap untuk mengamankan putusan banding itu," tutur Laode dalam konferensi pers di kantor KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (7/10) malam.

"Setelah pemeriksaan selama 1 x 24 jam, disimpulkan bahwa ada tindak pidana korupsi sehingga menaikkan status ke penanganan perkara.

KPK menetapkan Aditya selaku pemberi suap dan Sudiwardono selaku penerima suap sebagai tersangka," ujar dia.

Laode mengatakan, OTT berawal pada Jumat sore ketika Sudiwardono dan istrinya, Y, tiba di Jakarta dari Manado. Keduanya lalu menginap di salah satu hotel di Pecenongan. "Hotel dipesan oleh Aditya atas nama orang lain," ungkap Laode.

Setelah itu, pada Jumat malam sekitar pukul 23.15 WIB, setelah kembali dari acara makan malam keluarga, Sudiwardono tiba di hotel tempatnya menginap. Laode menuturkan, penyerahan uang suap dari Aditya terhadap Sudiwardono diindikasikan terjadi di pintu darurat hotel itu. "Setelah itu, KPK mengamankan Aditya dan ajudannya, YDM, di lobi hotel," lanjut Laode.

Aditya mendekati Sudiwardono yang juga bertindak sebagai ketua majelis banding kasus itu. Laode menjelaskan, besaran nilai *commitment fee* yang dijanjikan Aditya sebesar 100 ribu dolar Singapura atau senilai Rp 1 miliar.

Saat menuju ke kamar Sudiwardono, tim KPK menemukan uang sebesar 30 ribu dolar Singapura di dalam amplop berwarna putih dan 23 ribu dolar Singapura di dalam amplop coklat yang merupakan sisa dari pemberian uang suap sebelumnya. Tim KPK juga mengamankan uang sebesar 11 ribu dolar Singapura di dalam mobil Aditya.

Laode melanjutkan, penyerahan suap di Jakarta pada Jumat malam

bukan kali pertama. Sebelumnya, uang sebanyak 60 ribu dolar Singapura diduga sudah diserahkan oleh Aditya kepada Sudiwardono di Manado. "Sementara itu, uang suap sebesar 30 ribu dolar Singapura diserahkan di Jakarta pada Jumat," kata Laode.

Menurut Laode, uang ini merupakan bagian dari total *commitment fee* secara keseluruhan. "Dari OTT ini, KPK mengamankan uang sebesar 64 ribu dolar Singapura. Sementara itu, lima orang yang terjaring, yakni Aditya, Sudiwardono, Y, YDM, dan M (sopir Aditya), sudah dibawa ke KPK untuk menjalani pemeriksaan," tambah Laode.

Laode menambahkan, Aditya menggunakan kode "pengajian" sebelum menyalurkan uang suap kepada Sudiwardono. "Kode yang digunakan (mohon maaf) menggunakan kata 'pengajian'. Jadi, tersangka mengatakan, 'Pengajiannya bertempat di mana?'" ujar Laode.

Bersih-bersih

Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung (MA), Sunarto, mengunjungi KPK, Sabtu malam. Sunarto menyatakan akan melakukan pembersihan terhadap jajaran penegak hukum di bawah MA.

Sunarto tiba di KPK sekitar pukul 18.35 WIB. Dia menuturkan, kedatangannya kali ini berkaitan dengan kerja sama antara MA dan KPK. "Kita lagi bersih-bersih, *gitu loh*. Semakin cepat, semakin baik bersihnya," ujar Sunarto menjawab pertanyaan

wartawan.

Saat disinggung mengenai perkembangan penanganan OTT di Sulut, Sunarto tidak memberikan jawaban. Namun, Sunarto mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas OTT kali ini. MA juga menghargai tindakan KPK yang dinilai mendidik aparat penegak hukum di bawah MA.

"MA telah mengeluarkan regulasi, yaitu *whistleblowing system*, yang mana di situ banyak info yang diberikan aparat MA sendiri. Percaya, aparat MA dan pengadilan jauh lebih banyak yang baik. Aparatur yang baik tersebut tidak bisa menerima dan tidak rela bila ada rekan-rekannya ada yang ingin menodai badan peradilan di bawah MA," tutur Sunarto.

Hakim Agung Gayus Lumbuun mengusulkan adanya evaluasi terhadap seluruh jajaran peradilan di bawah Mahkamah Agung, dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga MA. Evaluasi juga untuk menentukan kembali posisi ketua dan wakil ketua di semua tingkat tersebut.

Hal itu didasarkan pada adanya fakta penyimpangan yang terjadi secara masif di lingkungan peradilan yang dilakukan oleh aparat kepaniteraan hingga hakim. Perbuatan itu bisa sering terjadi lagi apabila posisi pimpinan masih diduduki oleh orang-orang yang belum dievaluasi kembali.

Dia mengatakan, pandangan tersebut berdasarkan perkembangan analisis yang menunjukkan bahwa banyak aparat pengadilan, dari panitera sampai hakim di tingkat PN dan PT, terjerat kasus dugaan suap. "Penyebabnya adalah mereka sudah anomali, yaitu tidak takut lagi, mensesampingkan, mengabaikan aturan hukum dan perundang-undangan serta moral dan integritas yang sepatutnya mereka hormati dan taati."

■ antara ed: mansyur faqih

“
Jadi, tersangka mengatakan, 'Pengajiannya bertempat di mana?'
”